

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau identitas palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terdakwa dan pertimbangan putusan hakim dalam Putusan No. 99/Pid.B/2023/Bnj, di mana terdakwa melakukan penipuan dengan menyamar sebagai anggota TNI dan meminjam uang korban untuk berinvestasi dalam usaha pengadaan opak ubi kayu. Korban mengalami kerugian sebesar Rp 200.000.000 yang ditransfer ke rekening pihak yang diklaim sebagai istri terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mengkaji bahan hukum sekunder seperti buku, peraturan perundang-undangan, bahan dari internet, wawancara, dan sumber lainnya yang relevan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan mengacu pada norma hukum dalam perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, meliputi adanya unsur tipu daya, niat jahat (*mens rea*), serta akibat yang merugikan korban secara finansial

Kata kunci : Penipuan, Pertanggungjawaban Pidana, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

*Criminal fraud is an unlawful act aimed at benefiting oneself or others by employing deception, a series of lies, or a false identity, as regulated in Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). This study analyzes the criminal liability of the defendant and the judicial considerations in Decision No. 99/Pid.B/2023/Bnj, in which the defendant committed fraud by impersonating a military officer and borrowing money from the victim for an alleged investment in a cassava cracker procurement business. The victim suffered a financial loss of IDR 200,000,000, which was transferred to the account of an individual claimed to be the defendant's wife. This research employs a normative juridical method, examining secondary legal materials such as books, legislation, online sources, interviews, and other relevant references. The study is qualitative in nature, focusing on legal norms in statutory regulations, court decisions, and societal norms. The findings indicate that the elements of fraud under Article 378 of the KUHP are fulfilled, including the presence of deception, criminal intent (*mens rea*), and financial harm suffered by the victim*

Keywords: Juridical analysis, Tortious act or unlawful act, Court decision